

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pertumbuhan UMKM terus meningkat sebagai hasil dari dukungan Pemerintah yang kuat terhadap usaha mereka. Ini sangat penting untuk mengantisipasi perekonomian ke depan dan menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. UMKM sendiri sangat berperan penting kepada masyarakat karena adanya UMKM, ekonomi masyarakat semakin bertambah dan masyarakat yang pengangguran (masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan) dapat berpartisipasi dan mengikat bagian di UMKM, dalam hal ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan usaha-usaha kecil yang ada di desa akan tetapi hal itu tentunya diperlukan dukungan dari pemerintah dimana pemerintah juga ikut dalam upaya pengembangan UMKM di desa yakni dengan membuat program maupun kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk program atau kegiatan pemberdayaan dimana hal tersebut dapat menjadi wadah maupun tempat belajar para pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki melalui satu tempat atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Istamto (1996: 296), ada tiga (atau tiga) tugas utama yang paling penting untuk menyelesaikan program implementasi kebijakan:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan metode untuk menjalankan program
2. Interpretasi, menafsirkan bahwa dalam hal status program seringkali menjadi rencana dan instruksi yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
3. Penerapan, kebijakan biasa untuk pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang di sesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dengan mempertimbangkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses menerapkan konsep, prosedur, atau berbagai aktivitas baru dengan harapan bahwa orang lain akan menerimanya dan membuat perubahan dalam sistem birokrasi untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan bantuan kelompok pelaksana yang dapat dipercaya. Cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan terkait dengan implementasi kebijakan. Konsep implementasi kebijakan mengatakan bahwa implementor harus tahu apa yang harus dilakukan agar membuat kebijakan tidak salah. Selain itu, untuk

mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran harus diberitahukan tentang tujuan dan sasaran kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki sifat seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis dalam komunikasi mereka dengan organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan. Jika pelaksanaan kebijakan memiliki sifat atau karakter yang baik, maka akan melaksanakan kebijakan secara efektif sesuai dengan tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Usaha Mikro Menengah (UMKM) adalah jenis usaha dengan skala kecil atau menengah, memiliki sedikit uang, dan mempekerjakan sedikit orang. Dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil, UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Seperti yang dinyatakan (Sopah, 2020), UKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini karena fakta bahwa mereka dapat mempengaruhi banyak orang di berbagai bisnis, yang berarti masyarakat memiliki kemampuan untuk mengurangi keduanya. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) menghasilkan produk dan jasa dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa. Banyak negara menganggap UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, dan pemerintah sering memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dalam bentuk program dukungan dan pengembangan.

Kebijakan Usaha Kecil Menengah (UMKM) adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mendukung, memfasilitasi, dan meningkatkan produktivitas UMKM, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Dijelaskan (Sopah, 2020) bahwa kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah publik yang ada dan memperluasnya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian yang membutuhkan dukungan dan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat berpengaruh pada UMKM karena pelaku UMKM dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM, seperti akses keuangan yang terbatas, masalah regulasi, dan kurangnya akses seperti keuangan yang terbatas, masalah regulasi, dan kurangnya akses ke pasar. Kebijakan publik juga dapat membantu meningkatkan kontribusinya pada perekonomian. Kebijakan publik juga dapat membantu meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan UMKM. Dengan meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan hak-hak pekerja, serta mengatur penggunaan bahan baku dan limbah. Akibatnya, hubungan antara kebijakan publik dan UMKM sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga

terkait harus bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk membuat kebijakan publik yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM. Menurut Winarno (2007:102), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dan juga mencakup upaya untuk mengubah keputusan.

Desa Preuner memiliki kemampuan untuk mengembangkan unit usaha skala desa yang diusahakan oleh warganya sendiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, meningkatkan kualitas produk dan jasa, meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan daya saing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Desa Preuner dibangun dalam lima tahap, dengan tiga tahap utama didukung oleh kelompok Desa Kemiri yang ada. Berikut adalah tahapan yang dimaksud:

1. Tahapan Embrio atau Penumbuhan adalah tahap utama pertama. Ini adalah tahapan pengenalan atau pendalaman potensi desa dan pemahaman dinamika tatakelola wirausaha. Tahap ini juga mencakup identifikasi potensi usaha dan tatakelola usaha (produksi, potensi pasar, dan kelembagaan).
2. Tahapan kedua, pengembangan adalah pengembangan bisnis melalui strategi usaha dan manajemen pemasaran yang baik.
3. Tahap ketiga, maju, berfokus pada pengembangan bisnis dan pengembangan kemitraan dan jaringan.
4. Tahap keempat, pelepasan dan pembinaan untuk mengetahui bagaimana usaha mempengaruhi ekonomi lokal atau desa.
5. Tahap kelima, kelanjutan upaya untuk kebijakan selanjutnya.

Sumber: Profil Desa Kemiri 2021

Kalurahan Kemiri yang terletak di Kabupaten Gunungkidul sendiri merupakan salah satu kalurahan yang memiliki banyak pelaku UMKM yang berpotensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kalurahan telah berkontribusi secara tidak langsung pada pembangunan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan telah ikut serta dalam pembentukan

kebijakan dalam hal perencanaan, program, kegiatan, dan sarana prasarana hingga akses pasar. Dalam mengembangkan usaha kecil memerlukan akses informasi yang kuat dimana sebuah sektor bisnis ekonomi bisa berkembang di sebuah wilayah (kecamatan tertentu). Jika dapat menerapkan pengaturan manajemen dengan baik, maka UMKM dapat bertahan dan kompetitif. Pengaturan manajemen biasanya mencakup pemasaran, pembuatan, sumber daya manusia, dan keuangan. Pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk mendirikan usaha kecil dan menengah (UMKM) dibantu melalui program pengembangan UMKM. Para peserta dididik untuk menerapkan keahlian kewirausahaan, menentukan dan memilih proye bisnis yang cocok atau memperluas bisnis saat ini, dan dengan hati-hati membuat proposal perencanaan bisnis atau suatu program untuk di presentasikan ke lembaga keuangan. Tujuannya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: (1). Menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2). Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi sistem usaha yang tangguh dan mandiri; (3). Meningkatkan peran dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Hasri, 2014). Adapun jumlah anggota pelaku UMKM yang masuk kedalam program desa preneur sebagai berikut;

Tabel 1.1 daftar pelaku UMKM kalurahan kemiri

NO	NAMA	ALAMAT
1	Ninda Dwi Jayanti	Kemiri
2	Rohmini A	Wates
3	Septianingsih	Wates
4	Hariyanti	Panggung
5	Ririt Setyowati	Kemiri
6	Winarti	Dayakan li
7	Sutini	Dayakan li
8	Bandiyah	Dayakan I
9	Limas Aldela Damaiyanti	Dayakan I
10	Endang Sri Lestari	Guyangan
11	Mia Sekar Arum	Guyangan
12	Saskia Utami	Glagah
13	Aprillya Setyawati	Glagah
14	Yuni Muslita	Gebang
15	Muji Lestari	Glagah
16	Surtini	Bareng
17	Suryanto	Bareng
18	Arifin	Gebang
19	Putikhatun	Dayakan I

20	Sugeng Riyadi	Dayakan I
21	Erni Supranti	Gebang
22	Nuri Setyaningsih	Glagah
23	Vella Qodziah	Kemiri
24	Martini	Dayakan I
25	Sumanto	Bareng
26	Sandi Nur Pitoroso	Gebang
27	Parlan	Bareng
28	Sepen	Kemiri
29	Suwarni	Kemiri
30	Wasirah	Bareng
31	Giyatno	Karangnongko
32	Endang Suprihatin	Dayakan I
33	Sutirah	Wates
34	Sugiyono	Panggung
35	Turah	Gebang
36	Sajinem	Bareng

Sumber: Profil Kalurahan Kemiri

Daya tahan sektor UMKM menyelamatkan pelaku ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada modal asing. Selain itu, keberfungsian modal sosial membantu menggerakkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kalurahan kemiri juga banyak memiliki potensi dalam bidang usaha atau UMKM yakni bisnis, seperti tepung moca, kripik olahan biji-bijian seperti peyek, lemet, olahan labu kuning, bakpia, kerajinan, emping mlinjo, olahan dari singkong seperti rengginan, krecek telo dan juga yang terbaru adalah kerajinan batik sekar sogo. Dengan berbagai potensi yang ada, tentunya diperlukan sebuah pendekatan mengenai bagaimana para pelaku UMKM ini dapat tetap produktif, berkembang, dan maju sebagai penggerak ekonomi desa. Pemerintah kalurahan diharapkan mampu bekerjasama dengan Dinas Koperasi terkait dalam pengembangan UMKM dikalurahan kemiri sendiri. Untuk mengembangkan maupun menumbuhkan perekonomian dikalurahan kemiri sendiri pemerintah kalurahan bekerja sama dengan diskop untuk bersama-sama mengembangkan UMKM yang ada dikalurahan kemiri dengan membuat program dimana dengan program ini mampu membantu pelaku-pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usaha mereka melalui pengadaan fasilitas, pelatihan maupun modal program yang dibuat ini merupakan kebijakan pemerintah kalurahan kemiri agar supaya unit-unit usaha kecil di kalurahan kemiri dapat belajar dalam hal pemasaran, packaging, maupun pelatihan-pelatihan lainnya sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi para pelaku usaha dapat produktif dan menambah nilai ekonomis. program tersebut adalah Desa Preneur. Tujuan

dari kerjasama antara pemerintah dalam memberikan Program Desa Preuner untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk mengembangkan UMKM yang ada pada Kalurahan Kemiri sehingga pelaku UMKM mudah dalam hal pekejingnya, pemasarannya. (Sumber: Profil Kelurahan Kemiri)

Daftar UMKM dalam Program Desa Preuner tabel. 1.2

No.	Nama UMKM yang masuk dalam Program Desa Preuner
1.	UMKM Kerajinan Batik Sekar Sogo
2.	UMKM Tepung Mocaf
3.	UMKM Keripik Olahan Biji-Bijian Seperti, Peyek, Lemet, Olahan Labu Kuning, Bakpia Dan Emping Melinjo

Sumber: Profil Desa Kemiri

Di era yang semakin kompetitif ini, langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM adalah meningkatkan kualitas produk, kualitas tenaga kerja, dan akses pasar. Menurut Agustin (2016:572) mengungkapkan bahwa indikator dalam pengembangan UMKM meliputi:

1. Peningkatan kualitas produk: UMKM harus berfokus pada meningkatkan kualitas produk yang mereka buat. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan proses produksi, menggunakan bahan berkualitas tinggi, dan mengadopsikan teknologi yang tepat. Dengan meningkatkan kualitas produk, UMKM dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar.
2. Peningkatan kualitas SDM: UMKM harus mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas tinggi, mereka dapat mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan lebih baik beradaptasi dengan perubahan pasar. Ini dapat dicapai dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan yang tepat.

3. Meningkatkan Akses Pasar: UMKM harus memiliki akses pasar yang lebih baik. Ini dapat dicapai dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam rantai nilai. Dengan memiliki akses pasar yang lebih luas, UMKM dapat meningkatkan penjualan dan berkembang.

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.20 tahun 2022, Desa Preneur diizinkan untuk menumbuhkan unit usaha skala desa yang diusahakan oleh warganya sendiri dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warganya melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan kualitas produk atau jasa, nilai tambah, dan daya saing. Lembaga ekonomi desa seperti UMKM, Koperasi, dan BUMDES harus berpartisipasi secara aktif. Sehingga dapat membentuk konsorsium untuk memasarkan barang dan jasa yang dibuat oleh masyarakat. Strategi pemasaran berfokus pada penciptaan dan pengembangan merek barang dan jasa desa. Sehingga Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM, dapat membantu para pelaku UMKM yang masih minim dalam pemasaran dan pengemasan produk UMKM. Dapat belajar dan mampu mengembangkan usahanya.

Semua usaha mikro yang ada di Kalurahan dapat termasuk dalam program desa preuner yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan. Ini akan membuat satu wadah untuk mengembangkan UMKM dan memberantas kemiskinan di Kalurahan Kemiri. Desa Preuner dapat meningkatkan ekonomi Masyarakat. Desa Preuner dapat menumbuhkan unit usaha skala desa yang di usahakan oleh warga desa melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausah, peningkatan kualitas produk atau jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Program Desa preuner dalam pengembangan UMKM di kalurahan kemiri memiliki hambatan dan tantangan yang di hadapi oleh pemerintahan kalurahan dalam mengembangkan UMKM yaitu masih kurangnya optimalnya kurangnya biaya dalam mengembangkan desa preuner. Pada dasarnya, membangun UMKM adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh UMKM, upaya diperlukan untuk: (a). menciptakan iklim usaha yang baik, (b). memberikan bantuan permodalan, (c). melindungi usaha atau bisnis, (d). membangun kolaborasi, (e). memberikan pelatihan, (f). meningkatkan promosi, dan (g). Menciptakan kerjasama yang setara (Alyas & Rakib, 2017)

Serta pemerintah kurang memberikan pelatihan dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM untuk bisa lebih maju dalam mengembangkan UMKM dalam program Desa Preuner dan tidak hanya itu terbatasnya modal untuk pelaksanaan kebijakan ini masih terbilang sangat kurang sehingga fasilitas maupun pelatihan yang diberikan menjadi kurang optimal. melihat dari Tujuan Desa Preneur sendiri adalah untuk: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, (2) meningkatkan semangat kewirausahaan dan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM, (3) menekan kerentanan sosial ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Salah satu Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Desa Preneur untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah perdesaan, masyarakat masih menghadapi masalah orientasi pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ekonomi perdesaan tidak tumbuh secara cepat seperti di Kota. Sebaliknya, perdesaan juga memiliki potensi ekonomi yang bagus jika di kelola dengan cara yang bijak, tepat, kreatif, dan berkelanjutan. Sehingga dengan melihat fakta yang ada dilapangan peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan desa preneur ini dalam mengembangkan UMKM dan sejauh mana program desa preneur ini sudah berdampak bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat serta bagaimana Pemerintah dapat mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan mampu mengembangkan UMKM di kalurahan kemiri melalui kegiatan, maupun pemberian fasilitas bagi para pelaku UMKM di kalurahan kemiri dan kemajuan perekonomian di Kalurahan Kemiri sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Desa Preneur Dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Bagaimana implementasi kebijakam program desa preneur sebagai pengembangan UMKM di kalurahan kemiri?
- b) Bagaimana dampak program desa preneur dalam pengembangan umkm di kalurahan kemiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Desa Preuner Sebagai Pengembangan Umkm Di Kalurahan Kemiri, dan dampak Program Desa Preuner Dalam Pengembangan Umkm Di kalurahan Kemiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul” mempunyai manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pemerintah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program desa preuner dan pengembangan UMKM

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini membantu:

- a) Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau gambaran untuk para penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan program desa preuner dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul
- b) Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada pemerintah mengenai Implementasi Kebijakan program desa preuner Dalam Pengembangan UMKK Di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan Implementasi Kebijakan program desa preuner Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul
- c) Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai

Implementasi kebijakan program desa preuner dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca skripsi ini secara menyeluruh maka penulis menyajikan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman skripsi:

- 1) bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar tabel serta halaman daftar intisari dan halaman abstrak.
- 2) Bagian utama

BAB I PENDAHULUAN,

Pendahuluan berisi latar belakang tentang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Tinjauan pustaka tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN,

Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian serta metode yang digunakan, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang di gunakan dalam proses penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN,

Bab ini berisi tentang hasil data-data yang telah didapat dari hasil penguji data.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang di rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian.

- 3) Bagian akhir

Berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran